



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Kejari Bukti Proyek Rp 87 M Sesuai Spek**

**Kejati Geber Kasus Pengaman Pantai**

**BENGKULU** - Kejati Bengkulu mengesbut pengusutan dugaan korupsi proyek multiyears pembangunan pengaman abrasi di Pantai Pasar Ipuh, Kabupaten Mukomuko senilai Rp 87 miliar. Jaksa mencari bukti indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi (Spek).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoerkartika SH MH didampingi Kasi Penyidikan, Danang Prasetyo Dwiharjo SH mengatakan bahwa pihaknya masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk melakukan pengusutan proyek besar ini.

► Baca **KEJAR..Hal 7**

**Sambungan dari halaman 1**

Hal itu karena pihaknya masih terkendala terhadap pengambilan sample atas pembangunan fisik proyek tersebut.

Bahkan tim penyidik telah dua kali turun ke lapangan dan baru mengumpulkan sekitar 40 titik sampling. Itu mengingat panjang proyek tersebut mencapai 2,6 km dan terdapat lebih dari 100 segmen.

Dimana dari satu segmen itu setidaknya terdapat hingga tiga titik sample yang perlu diambil untuk memeriksa kuantitas dan kualitas pekerjaannya.

"100 lebih segmennya, karena proyeknya panjang sekali mencapai 2,6 km, untuk itulah masih memerlukan waktu karena harus mengambil semua bukti sample," jelasnya.

Nantinya, setelah semua sample diambil akan dilakukan uji lab untuk memeriksa kualitas dan kuantitas pembangunan penahan abrasi itu. Hal itu karena memang tim di lapangan telah menemukan adanya indikasi kerugian negara dan juga pengurangan kualitas hasil pekerjaan yang tak sesuai perencanaan. Adapun tim yang diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan yakni jaksa penyidik, pihak BWSS, Ahli, kontaktor dan pengawas proyek.

"Beberapa barang sudah kami se-

gel dan akan kami uji lab, Indikasinya pengurangan kualitas dan kerugian negara itu ada, saat ini masih di teliti," lanjutnya.

Sejauh ini untuk pemeriksaan saksi sendiri telah mencapai lebih dari 15 orang yang diminta keterangan baik dari pihak kontaktor, pejabat BWSS, pengawas dan lainnya. Namun pihaknya mengakui masih akan melakukan pemeriksaan saksi lanjutan karena keterangan yang diperlukan masih dinilai belum mencukupi. Adapun saksi yang dipanggil dalam waktu dekat ini adalah beberapa pekerja lapangan pada proyek tersebut.

"Pemeriksaan saksi masih ada beberapa lagi yang akan kita panggil dan akan dialami lagi, saksinya itu nanti dari pekerja lapangannya," ungkapnya.

Pandoe mengakui bahwa yang diusut oleh Kejati adalah pada tahun pekerjaan 2017 dan 2018. Dimana dalam indikasinya, volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi. Bahkan untuk yang pengusutan dugaan korupsi di pengaman abrasi adalah pelaksanaan pekerjaan PT. Berantas Adi Karya diduga mensubkontrakan kepada perusahaan lain secara berjenjang. Nilainya cukup fantastik yakni mencapai Rp 90 miliar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun

total nilai yang tercantum dalam kontrak Rp 87 miliar yang dilaksanakan oleh PT. Berantas Adi Praya.

Sedangkan untuk proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Air Cendam Bawah Kecamatan Lebong Sakti dan Kecamatan Amen Kabupaten Lebong senilai Rp 2,9 miliar. Proyek ini diusut Kejati sesuai laporan masyarakat yang tidak puas atas hasil pekerjaan: Beberapa bagian pembangunan sudah mengalami kerusakan, finishing saluran pembuangan irigasi tidak jelas sehingga sempat menimbulkan banjir. Yang mana saat ini pengusutan diistirahatkan sejenak karena sedang menjalani proses di Inspektorat Lebong.

"Untuk yang lebong masih proses di Insektorat atau APIPnya, bahkan beberapa bagian yang rusak telah diperbaiki, nanti kita lihat perkembangannya," pungkasnya.

Proyek di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu dengan kontraktor PT Berantas Adi Praya. Proyek ini menghabiskan anggaran dari APBN sebesar Rp 87 miliar dari tahun 2017 hingga 2018 yang lalu. Dimana dalam pengerjaannya terindikasi adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dan PT. Berantas Adi Karya diduga mensubkontrakan kepada perusahaan lain secara berjenjang. (cup)